

ABSTRAK

R. Ambang Wicaksana (1010611021), Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Prajurit TNI Berdasarkan KUHP Dan KUHPM. Dibawah bimbingan Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM.

Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hukum mempunyai peran sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu diaturlah ketentuan-ketentuan tindak pidana umum maupun khusus di Indonesia. Dalam hal tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah seorang militer, terdapat hal-hal khusus yang melekat dalam diri militer yang merupakan/termasuk kedalam subjek dari tindak pidana umum (KUHP) maupun tindak pidana khusus (KUHPM). Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembuatan skripsi ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi tindak pidana pencurian terhadap barang milik masyarakat atau aset tentara atau militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI menurut KUHP dan KUHPM serta bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian. Dalam hal ini penulis mengambil 2 (dua) contoh kasus putusan, pertama kasus Nomor : 67-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2012 dengan objek senjata api garand milik inventaris Rindam XVI/Pattimura dan yang kedua kasus Nomor : 205-K/PM.II-09/AD/X/2012 dengan objek kendaraan roda dua “motor” milik masyarakat sipil. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis data yang digunakan meliputi sumber data sekunder. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa jika militer tersebut melakukan tindak pidana pencurian, dalam hal penerapannya oleh Oditur dapat menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda tergantung unsur-unsur dari objek pencurian tersebut. Serta dalam menegakan hukum pidana materil perlu diketahui siapa saja yang berhak menerapkan hukum pidana formil yang terdakwanya adalah militer menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang akan menjelaskan bagaimana memproses terdakwa didalam pengadilan dan apa saja hak-hak tersangka sebelum atau sesudah memasuki peradilan sampai diputusnya perkara tersebut oleh Hakim.

Kata Kunci : Pencurian Militer, Penerapan Sanksi, Proses Penyelesaian

ABSTRACT

R. Ambang Wicaksana (1010611021), Juridical Analysis Crime of Theft Doing by Army Personnel According to KUHP and KUHPM. Under the guidance of Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM.

State of Indonesia in the Constitution of Fundamental 1945 Article 1 Paragraph (3) says that Indonesia is a State of law. Law has a role as a central point in the whole life of the individual and national life. Therefore arrange the provisions of general or special criminal offense in Indonesia. In the case of crime of theft that the culprit was a military man, there are specific things that inherent in the military which is/included into the general subject of a criminal offense (KUHP) as well as special criminal offense (KUHPM). As for the problems in the making of this thesis is how the application of sanctions against the crime of theft of public property or troops or military assets committed by Army personnel under the Criminal Code and KUHPM and how the process of resolving the crime of theft. In this case the author took 2 (two) case sample, the first case Number : 67-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2012 with object firearms model Garand, owned by inventory Rindam XVI/Pattimura and the second case Number : 205-K/PM.II-09/AD/X/2012 with object two wheeled vehicle "motorcycle" property of civil society. The research method in this thesis using normative research methods. While the types of data used include secondary data sources. From these results it can be concluded, that if the military is committing a crime of theft, in terms of its application by Oditur can imposed that criminal sanctions be different, depending on the elements that mentioned in theft object. As well as the need to enforce the material criminal law known to anyone who has the right implementation for formal criminal law that the defendant is a military under the Act No. 31 Year 1997 of Military Justice that would explain how the defendant in the court process and what are the rights of suspects before or after entering the court until the judge decides the case.

Keywords: Military Theft, Application of Sanctions, Settlement Process